

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis tentang upaya pemerintah provinsi jambi dalam penyelesaian Tapal Batas di desa ladang panjang dapat disimpulkan:

1. Adapun upaya pemerintah provinsi jambi dalam penyelesaian Tapal Batas di desa ladang kurang baik sebab keberhasilan dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya belum maksimal. Sebab selama ini pemerintah desa sudah sering menyurati pemerintah terhadap masalah batas baru dibalas diterbitkannya Permendagri No 126 tahun 2017 tentang batas Daerah Kabuapten Muaro Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan kurangnya koordinasi dengan tingkat kabupaten sehingga masyarakat belum mendapatkan kepastian akan daerah batasnya. Karena pada dasarnya kewenangan yang dilipahkan pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten merupakan asas otonomi hal ini harus segera dituntaskan supaya tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dan agar bisa mejadi pelayan yang baik bagi masyarakat serta bisa terjamin keseimbangan pemerataan pembangunan di perbatasan khususnya desa Ladang panjang.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dari upaya pemerintah provinsi dalam menyelesaikan tapal batas di desa ladang panjang dan desa mekar jaya

sebagai berikut:

1. Lambatnya tanggapan dari pemerintah provinsi dalam menanggapi aspirasi masyarakat desa Ladang Panjang.
2. kurangnya koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah yang berbatasan
3. Kurangnya koordinasi antaran pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mensosialisasikan Permendagri No 126 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Terbatasnya anggaran dana.
5. Kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan.
6. Medan yang sulit untuk dijangkau.
7. Cuaca yang tidak stabil.

#### **4.2. Saran**

1. Agar Penyelesaian tapal batas di desa ladang panjang dan desa mekar jaya dengan Baik, maka sebaiknya pemerintah mengontrol kelapangan agar penyelesaiannya berjalan dengan efektif dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tapal batas di desa ladang panjang dan desa mekar jaya maka pemerintah perlu adanya:
  - a. Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelesaian

penyelesaian tapal batas.

- b. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan serta kepada masyarakat.
- c. Adanya peningkatan anggaran dana untuk melaksanakan tahapan tahapan atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan penyelesaian konflik perbatasan. Seperti diketahui dalam penyelesaian konflik perbatasan ini dana yang diperlukan tidak sedikit.

